

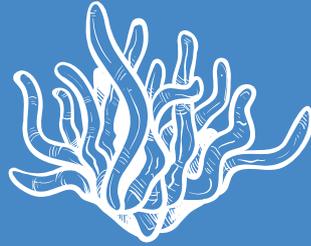
Catatan Perjalanan

Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali & Nusa Tenggara Barat

PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN

Maret 2021





PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM & PEMANFAATAN BERKELANJUTAN



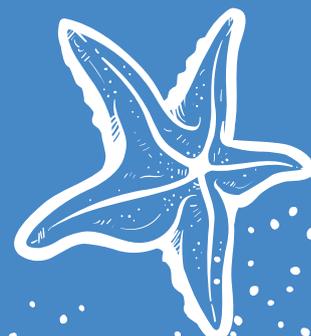
Hak Cipta © 2021
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Dilarang memperbanyak/mengkopi sebagian atau keseluruhan isi proceeding dalam bentuk apapun tanpa seizin dari ICCTF



DAFTAR ISI

- 01.
Prakata
- 02.
Latar Belakang
- 03.
Agenda
- 04.
Susunan Tim
- 05.
Catatan Perjalanan
- 06.
Coverage Publikasi
- 07.
Galeri Foto



01. PRAKATA



Para mitra dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Prosiding *Kick Off Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)* Asian Development Bank di tahun 2021, yang menyajikan cerita perjalanan yang berlangsung selama 2 hari yaitu 30-31 Maret 2021 di Provinsi Bali.

Rangkaian kegiatan *Kick Off COREMAP-CTI ADB* ini diselenggarakan oleh Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan para mitra pelaksana lokasi Nusa Penida, Bali yaitu Coral Triangle Center (CTC), Sucofindo, PT Trans Intra Asia, dan Yayasan Bahtera Nusantara Raya (Yayasan Banur)

Kegiatan *Kick Off COREMAP-CTI ADB* ini dilaksanakan dalam rangka meresmikan pelaksanaan kegiatan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat serta memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan di bawah program COREMAP-CTI dengan dana hibah dari Asian Development Bank (ADB).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat sipil dan lokal, akademisi, serta *civil society organization (cso)*. Keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memberi masukan dalam mendesain konsep rumusan kebijakan dan langkah strategis yang dapat dijalankan untuk memperkuat implementasi pelaksanaan COREMAP - CTI ADB.

Semoga prosiding ini dapat bermanfaat sebagai media diseminasi ide dan pola pikir sesuai dengan tujuan *Kick Off COREMAP - CTI ADB* di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Jakarta, 20 April 2021

Dr. Tonny Wagey
Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund

02. LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang tinggi, tersebar di daratan, lautan, maupun daerah peralihan antara lautan dan daratan yaitu daerah pesisir. Sebagai negara mega biodiversitas, Indonesia memiliki 25% aneka spesies di dunia. Indonesia tercatat memiliki 4.512 jenis ikan yang sebagian besar hidup di air laut, yaitu sebanyak 3.429 jenis. Sebagian dari jenis ikan tersebut tercatat sebagai ikan endemik, yaitu sebanyak 120 jenis. Sebagai upaya perlindungan biodiversitas tersebut, diperlukan daerah perlindungan laut yang dikelola dengan baik guna menjamin keberlanjutannya.

Pemerintah Indonesia menargetkan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebesar 32,5 juta Ha pada tahun 2030 atau 10% dari luas perairan di Indonesia. Hingga Desember 2019, kawasan yang telah dicadangkan sebagai kawasan konservasi sejumlah 196 kawasan. Adapun 166 lokasi diantaranya adalah kawasan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 30 kawasan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga pada akhir tahun 2019, dari 156 kawasan yang terbentuk, baru sebanyak 24 kawasan yang sudah ditetapkan sementara 132 kawasan masih berstatus dicadangkan. Untuk mengejar pencapaian diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder kunci lainnya.

Kawasan konservasi perairan, terdiri atas beberapa zona yang menjadi bagian penting dari rencana pengelolaan kawasan. Sebagai tindak lanjut dari pengelolaan kawasan konservasi perairan, diperlukan dukungan infrastruktur dan peningkatan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kawasan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi adalah kegiatan pemanfaatan kawasan. Implementasi pemanfaatan suatu kawasan konservasi perairan harus mengacu pada rencana pengelolaan dan peruntukan setiap zona.

Lokasi Proyek COREMAP-CTI ADB mencakup tiga kawasan perlindungan laut di Lesser Sunda yang memiliki keanekaragaman hayati kelautan yang tinggi, terdapat 76% spesies karang dan 2.631 spesies ikan karang. Bentang laut (*seascape*) Lesser Sunda meliputi tiga provinsi di Indonesia dan merupakan jalur migrasi keluarga Sirenia, Cetacea dan juga 6 spesies penyu dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik.



**SUPPORTING
THE INDONESIAN
GOVERNMENT
FOR A BETTER CLIMATE**

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)

Melalui proyek ini, dua provinsi yang menjadi lokasi sasaran yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengelola efektivitas tata kelola kawasan konservasi laut atau kawasan konservasi perairan (KKL) di Nusa Penida-Bali, Gili Matra dan Gili Balu-NTB.

Guna mendukung efektivitas tata kelola kawasan perairan di tiga lokasi tersebut, maka Indonesia Climate Change Trust Fund mengelola dana hibah COREMAP-CTI ADB yang bertujuan untuk mendukung pengelola kawasan konservasi laut, perencanaan pengelolaan berdasar sumber daya dan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Pendanaan hibah akan digunakan untuk mendanai 6 proyek implementasi (Grant Package/GP), 1 proyek kajian rantai pasok (supply chain) komoditi unggulan hasil laut yaitu Tuna, Kakap dan Rumput laut, dan 3 kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu program beasiswa Master Program di University of Queensland, *Short Term Internasional* dan *Short Term Nasional*.

Dalam RPJMN 2020-2024, WPPNRI tertuang di dalam PN nomor 1, yakni Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dan PP nomor 4, yakni Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan. Secara lebih rinci, pengarusutamaan WPPNRI kemudian dijelaskan dalam KP nomor 1, yaitu: Menjadikan WPP sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; dan KP nomor 2, yaitu Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah Kementerian PPN/Bappenas kemudian menginisiasi studi Supply Chain komoditas perikanan tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda.

Sehubungan dengan telah dilakukannya kontrak kerja dengan mitra pelaksana, yang akan mengerjakan proyek di NTB dan Bali, maka akan dilakukan kegiatan Kick-off Meeting COREMAP-CTI ADB yang melibatkan stakeholder daerah dan nasional. Kegiatan Kick-off Meeting COREMAP-CTI ADB yang diselenggarakan di Bali, terdiri dari pemaparan proyek, diskusi dan kunjungan lapangan.

03. AGENDA

30 MARET 2021

Registrasi dan Swab
Antigen Test

Menyanyikan Lagu
Indonesia Raya

Sambutan dari
Perwakilan
Provinsi Bali

Pengantar COREMAP-CTI
ADB oleh Direktur
Kelautan & Perikanan
Bappenas

Pembukaan oleh Deputi
Bidang Kemaritiman &
Sumber Daya Alam,
Bappenas

Pidato Kunci dari
Sekretaris Utama
Bappenas

Seremonial Peresmian Kick Off
COREMAP-CTI ADB di Provinsi
Bali dan NTB

Dialog Interaktif oleh perwakilan
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut, Kementerian Kelautan
& Perikanan, perwakilan Bappeda
Provinsi Bali dan perwakilan
ICCTF

Kunjungan Lapangan ke Indonesia
Coral Reef Garden

Penutupan
dan
Istirahat



03. AGENDA 31 MARET 2021

Induction Safeguard Policy
Statement (SPS) ADB

Pemaparan hasil kajian
cepat lokasi Proyek ADB

Kesimpulan dan Diskusi

Induction Administrasi
dan Program

Istirahat, sholat, dan
makan siang

Penutup



04. SUSUNAN TIM

KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMERINTAH DAERAH



MITRA PELAKSANA



05.

CATATAN KICK OFF COREMAP-CTI ADB PROVINSI BALI DAN NUSA TENGGARA BARAT

MELESTARIKAN TERUMBU KARANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



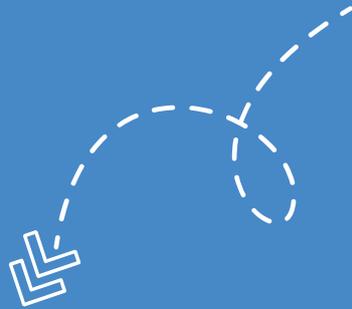
Pelaksanaan acara Kick Off COREMAP-CTI ADB ini dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Hotel Ritz Carlton, Nusa Dua, Bali. Sebagai tuan rumah Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak I Gede Indra Dewa Putra, SE, MM selaku Asisten 1, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Propinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan kondisi terakhir sektor Pariwisata di Propinsi Bali yang cukup terdampak secara signifikan. Sebagai jalan keluarnya, masyarakat mulai usaha dalam pengelolaan sumber daya hasil laut. Nusa Penida sebagai *icon* pariwisata bahari yang merasakan tantangan yang cukup berat akibat hilangnya pendapatan dari sektor

pariwisata mulai beralih pada usaha budidaya rumput laut. Beberapa kepala keluarga nelayan sudah memulai kembali usaha rumput laut yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Himawan Hariyoga Djojokusumo menyampaikan sambutan kunci (*keynote speech*) acara Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali dan NTB. Potensi Sumber daya terumbu karang Indonesia dimana dapat ditemukan sebanyak 39% jenis ikan karang yang ada diseluruh dunia; dengan luas karang mencapai 14% dari luas terumbu karang diseluruh dunia serta terdapat 596 jenis karang.



Sekretaris Utama Bappenas juga menyampaikan himbauan bahwa perairan di Propinsi Bali dan Provisi NTB memiliki terumbu karang dengan keaneka ragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Himbauan juga disampaikan untuk membangun kolaborasi para pihak untuk mendukung Program COREMAP-CTI ADB sehingga terbangun pemahaman dan juga kesepahaman bersama dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama terkait program COREMAP-CTI Provinsi Bali dan NTB dengan pendanaan ADB.



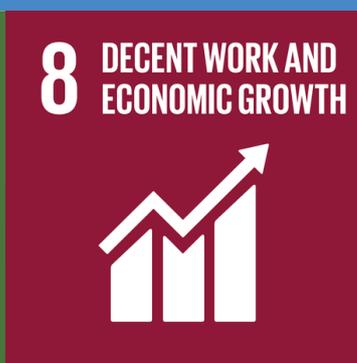
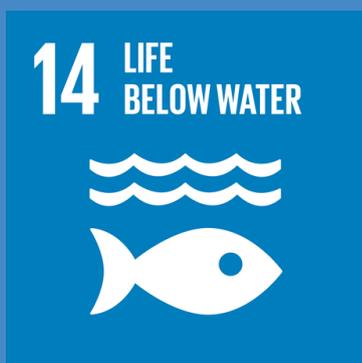
Secara resmi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyampaikan pidato Pembukaan Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali dan NTB. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kontribusi ekosistem terumbu karang yang sehat sebesar 2,6M USD pertahun untuk Indonesia (data diperoleh dari UNEP, 2018). Sehingga program COREMAP-CTI ADB di Indonesia menjadi penting untuk didukung melalui strategi penguatan kelembagaan, pengelolaan berbasis masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum serta penyadaran masyarakat.





Pemukulan gong oleh Himawan Hariyoga Djojokusumo selaku Sekretaris Utama Bappenas menjadi simbolis penanda dimulainya pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI dengan dana hibah ADB di lokasi Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Berkenan mendampingi Sekretaris Utama Bappenas adalah Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Harapannya melalui program COREMAP-CTI ADB di Provinsi Bali dan NTB dapat menjadi salah satu pengungkit dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 bagi masyarakat pesisir. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.





Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) telah dipercaya untuk mengelola Proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB).

Program COREMAP-CTI dana hibah ADB diimplementasikan pada periode Maret 2020 hingga Desember 2022 dengan total dana proyek sebesar USD 5,2 juta, dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan 10% efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Lesser Sunda khususnya di tiga lokasi proyek, yaitu Nusa Penida (Bali), Gili Balu dan Gili Matra (NTB).

Melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mitra pelaksana proyek, efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mencapai 80% Kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, 80% Kategori Biru untuk Kawasan Gili Matra dan 100% Kategori Hijau untuk Kawasan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu, NTB.



DIALOG INTERAKTIF

Sebagai bagian dari pelaksanaan Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali dan NTB, diadakan Dialog Interaktif dengan menampilkan tiga narasumber yaitu Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali, dan Executive Director Coral Triangle Centre, bersama moderator diskusi adalah Program Manager COREMAP-CTI ICCTF. Diskusi dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, Perwakilan Mitra Pelaksana Paket Hibah Program COREMAP-CTI ADB.



Paparan Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sesditjen PRL menyampaikan bahwa kebijakan Pemanfaatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dikelola dengan sistem zonasi mengacu pada Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kebijakan ini merupakan simplifikasi dari beberapa kebijakan sebelumnya, yaitu Permen KP No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil; kemudian Permen

KP No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; Permen KP NO. 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan Permen KP NO. 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.



Dengan kategori kawasan konservasi terdiri dari Taman, Suaka dan Kawasan Konservasi maritim.

Pada kesempatan diskusi interaktif tersebut, Seditjen PRL KKP juga menyampaikan ketentuan tahapan penetapan kawasan konservasi, yaitu diawali dengan usulan inisiatif calon kawasan konservasi. Dilanjutkan dengan melakukan Identifikasi dan Inventarisasi, kemudian melakukan pencadangan sehingga dilakukan penetapan dan sebagai tahap akhir adalah penataan batas.

Berdasarkan Prioritas Nasional - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 Luas Kawasan Konservasi Perairan diharapkan meningkat dari tahun 2020 luasnya 23,8 Juta hektar menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 3,1 juta hektar.

Peningkatan ini dalam rangka mencapai 32,5 Juta Hektar luas kawasan konservasi Perairan pada tahun 2030, atau seluas 10% dari luas perairan Indonesia. Adapun strategi penambahan area meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; WPP 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; kemudian WPP 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; dan WPP 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatra dan Selat Sunda.

Sedangkan target konservasi meliputi Perikanan, Keanekaragaman hayati, *spesies endangered, threatened and protected* (ETP) *species*; dan lokasi memiliki peninggalan sejarah.

Secara khusus Sesditjen PRL menyampaikan status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) ketiga kawasan konservasi pelaksanaan proyek COREMAP-CTI ADB, Taman Wisata Perairan (TWP) Nusa Penida, Bali nilai status EVIKA adalah 565,18%, sementara TWP Gili Matra, NTB nilai status EVIKA adalah 58,46%, sementara

untuk nilai nilai status EVIKA TPK Gili Balu, masih dievaluasi KKP. Berdasarkan pada peningkatan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diatas 50% -85% dikategorikan Level Perak dengan status dikelola otimum namun perlu diperlukan kerjasama bersama dalam memastikan pengelolaan yang berkelanjutan.

Paparan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyampaikan bahwa penataan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara adat dan budaya serta Agama Hindu Bali, menjadikan panoramanya “Metaksu/Mebhawa-Agung”, sehingga memikat hati wisatawan “ngelangunin”. Dimana pesisir dan laut Bali, dinilai penting secara budaya dan keagamaan serta ekonomi sekaligus merupakan sebagai kawasan suci dan tempat suci. Dipercaya sebagai Kahyangan Jagat, Dhang-Kahyangan, dan lainnya berkaitan dengan Segara Kertih.

Bali memiliki panjang garis pantai 666,35km atau 0,64% dari panjang garis pantai Indonesia, dengan luas perairan Laut: 9,212km². Adapun luas terumbu karang sekitar 7,765Ha, dan mangrove 2,215Ha serta Padang lamun adalah 1,196.5 Ha.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menginformasikan 14 kawasan dari 15 kawasan pariwisata di kawasan pantau dan laut Provinsi Bali , sebagaimana disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi – 2019.

Menjadi wisata tersohor dengan total kunjungan melebihi 10 juta Wisman dan Wisnus untuk Kawasan Wisata termasuk wisata religi. Selanjutnya, Kepala Dinas menyampaikan bahwa selain Wisata Bahari, potensi sumber daya alam laut Bali lainnya adalah sumber daya non-konvensional seperti pemanfaatan energi terbarukan dan industri air laut dalam; kemudian perhubungan laut, Industri kelautan melalui pemanfaatan Industri Bioteknologi kelautan serta sektor perikanan. Potensi sektor perikanan meliputi perikanan tangkap, *aquaculture*, industri pengolahan dan produk ornamental.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyatakan bahwa dampak Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk membangun kembali sektor kelautan, yang selama ini masyarakat menggeluti sektor pariwisata. Pelaksanaan *Quick Wins* pengembangan sektor kelautan Bali meliputi usaha perikanan tangkap, perikanan akuakultur, pemanfaatan sumberdaya non-konvensional dan pengusaha wisata bahari.

Paparan Direktur Eksekutif Coral Triangle Centre (CTC)

Diawal presentasinya Direktur Eksekutif CTC memperkenalkan organisasi CTC sebagai NGO dan bagian dari IUCN dan mitra resmi dari Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Serta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

CTC berperan aktif dalam pelibatan pembentukan kawasan konservasi perairan daerah melalui sistem zonasi, yang terdiri dari Zona inti, Zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Dalam penyusunan zona perikanan berkelanjutan ditetapkan pula sub-zona perikanan tradisional, sub-zona Pariwisata Bahari Khusus, dan Sub zona Budidaya Rumput Laut.

Sementara dalam zona pemanfaatan terdiri dari dua zona, yaitu: sub zona pariwisata bahari dan sub-zona pelabuhan. Untuk zona lainnya, termasuk sub-zona Suci.

Dukungan multi pemangku kepentingan terhadap kawasan konservasi Nusa Penida meliputi survei/pengumpulan data, studi/penelitian, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan pengawasan bersama. Pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Klungkung BPSPL Denpasar, Komunitas LSM Lokal Desa Tradisional, Sektor Swasta, Sukarelawan, Peneliti Akademisi, dan NGO.

Direktur Eksekutif CTC menyampaikan bahwa intervensi input dan proses selama 18 bulan untuk pelaksanaan Proyek meliputi Input, Proses dan Output. Dimana “Input” meliputi kompetensi SDM dan jumlah, anggaran dan sarana dan prasarana. Kemudian dalam komponen “Proses” meliputi kemitraan, SOP, pelatihan, pengelolaan dan pemeliharaan, pengawasan dan penegakan aturan dan pendampingan masyarakat. Untuk “Output” meliputi persentase tutupan karang/mangrove yang meningkat, populasi spesies target membaik, pelanggaran menurun dan partisipasi masyarakat meningkat.

CTC mengafirmasi keberhasilan pelaksanaan proyek dikarenakan faktor-faktor diantaranya Sintergitas kegiatan proyek dengan indikator kinerja utama (IKU) lembaga dan dinas terkait (Pusat, Provinsi maupun Kabupaten), mekanisme pelaporan dan evaluasi efektivitas kepada lintas kementerian/Lembaga yang terhubung dengan mekanisme pendanaan kawasan. Strategi pengembangan kapasitas personel UPT KKP berjenjang berdasarkan tahapan kawasan konservasi. Memasukkan indikator keberhasilan pengelolaan dan rencana kerja kawasan konservasi dalam RPJMD dan koordinasi komunikasi para pihak.

DIALOG PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai bagian dari pelaksanaan Kick Off Meeting, diadakan Dialog Pemangku Kepentingan yang menampilkan empat Mitra pelaksana Program COREMAP-CTI ADB yaitu, perwakilan PT. TIA – Yayasan Bahtera Nusantara, kemudian Perwakilan Coral Triangle Center (CTC) untuk pelaksanaan kegiatan proyek di Nusa Penida, Bali. Narasumber lainnya adalah Perwakilan dari PT Cakra Buana Aghna dan PT SUCOFINDO, untuk pelaksanaan pekerjaan di Gili Balu, NTB.



Paparan Pelaksanaan Kegiatan COREMAP-CTI ADB Nusa Penida

Perwakilan pelaksana Pekerjaan Paket 1, PT. Trans Intra Asia (TIA) dan Yayasan Bahtera Nusantara (Yayasan Banur), Anton Wijanarno selaku *MPA Specialist* Yayasan Banur, bersama Evi Nurul Ihsan, sebagai Project Coordinator CTC selaku pelaksana pekerjaan Paket 4, mempresentasikan rencana kerja yang akan dilakukan dalam meningkatkan efektivitas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) dalam proyek COREMAP-CTI di Nusa Penida, Bali menuju 80% kategori Biru (EKKP3K). Bentuk kegiatan yang akan dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, diantaranya:

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, diantaranya:

a. Konsultasi Publik atau *stakeholder engagement* terkait Program COREMAP-CTI dana hibah ADB, serta upaya peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K), seperti *Standard Operation Precedure (SOP)*, *Focus Group Discussion (FGD)* terhadap analisis termasuk valuasi jasa lingkungan kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Nusa Penida.

b. Melakukan beberapa kajian akademik diantaranya upaya mendukung pariwisata mola-mola, survey daya dukung mola-mola, identifikasi lokasi rehabilitasi mangrove dan terumbu karang serta baseline data, selain itu kajian *cost benefit analysis* termasuk valuasi jasa lingkungan kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang Nusa Penida, kajian identifikasi lokasi rehabilitasi mangrove dan terumbu karang berikut data dasar, serta melakukan update terhadap *Code of Conduct (COC)*.

c. Beberapa pelatihan juga akan dilakukan oleh Proyek COREMAP-CTI dana hibah ADB, seperti melakukan Pelatihan *Ecotourism* terkait *Endangered Threatened Protected (ETP) Species*. Pelatihan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas serta pelatihan operasional pengawasan; dan pelatihan untuk usaha masyarakat Nusa penida untuk meningkatkan taraf ekonomi kelompok sasaran.

d. Melakukan pembangunan infrastruktur berupa Pondok Informasi, Menara Pengawas beserta dukungan peralatan operasionalnya, seperti *Tourism Management System (TMS)*, serta sarana dan prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).



e. Melakukan kegiatan publikasi dan pendokumentasian pelaksanaan proyek.

f. Tim Yayasan Banur secara khusus akan memperkuat upaya pemberlakuan sistem pembayaran jasa dukungan ekosistem (*Payment Ecosystem Services*) sementara Tim CTC secara khusus mengupayakan sertifikasi produk Rumput laut Nusa penida.

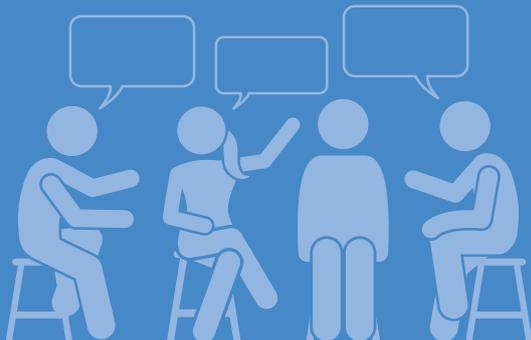
Peserta dialog yang sebagian besar berasal dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, menyambut positif terkait pelaksanaan proyek COREMAP-CTI di Nusa Penida. Beberapa peserta diskusi berharap pelaksanaan dapat dipercepat terutama program untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang harus berjuang dalam merubah mata pencahariannya dari sektor pariwisata menjadi pengelolaan sumber daya kelautan khususnya pengelolaan rumput laut.

Paparan Pelaksanaan Kegiatan COREMAP-CTI ADB Gili Balu

Perwakilan PT. Cakra Buana Aghna (CBA) yang berkonsorsoium dengan PT. Ciriayasa Engineering Consultants dan Konsepsi NTB, Saudara Febrian Kusuma Atmanegara selaku Project Coordinator Pekerjaan Paket 3, bersama Edward Danakusumah, selaku Project Coordinator PT. Sucofindo selaku pelaksana pekerjaan paket 6 mempresentasikan rencana kerja proyek COREMAP-CTI dalam upaya meningkatkan efektivitas Kawasan konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K) di Gili Balu, NTB pada 100% kategori Hijau. Adapun metode yang akan dilakukan, diantaranya:

a.

Konsultasi Publik atau stakeholder engagement terkait Program COREMA-CTI, upaya peningkatakan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K), seperti *Standard Operation Precedure (SOP)*, *Focus Group Discussion (FGD)* terhadap analisis termasuk valuasi jasa lingkungan kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Gili Balu. Secara khusus, melakukan pendampingan dalam penetapan kawasan pelaksanaan Rencana pengelolaan Zonasi (RPZ) Pengelolaan kawasan Konservasi Gili Balu;



b.

Melakukan beberapa survei dan kajian akademik diantaranya daya dukung pariwisata Gili Balu, identifikasi lokasi rehabilitasi mangrove dan terumbu karang serta baseline data, selain itu kajian *cost benefit analysis* termasuk valuasi jasa lingkungan kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang Nusa Penida, kajian identifikasi lokasi rehabilitasi mangrove dan terumbu karang berikut data dasar. Termasuk melakukan kajian *Willingness To Pay (WTP)* di kawasan Konservasi Gili Balu;

c.

Beberapa pelatihan juga akan dilakukan oleh Proyek COREMAP-CTI dana hibah ADB, seperti melakukan Pelatihan dalam peningkatan kapasitas masyarakat serta staf kantor pengelolaan karawasan. Pelatihan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas serta pelatihan operasional pengawasan; dan pelatihan untuk usaha masyarakat Nusa Penida untuk meningkatkan taraf ekonomi kelompok sasaran.



d.

Melakukan pembangunan infrastruktur berupa pondok informasi, menara pengawas beserta dukungan peralatan operasionalnya, serta sarana dan prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

e.

Melakukan kegiatan publikasi dan pendokumentasian pelaksanaan proyek, terutama dalam *best practices* dan pembelajaran dari pelaksanaan proyek.

Dialog terkait pelaksanaan proyek di Gili Balu juga mendapat perhatian dari peserta yang sedang melakukan kegiatan di Gili Balu untuk berkolaborasi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan dilakukan dalam wilayah yang sama dengan kelompok masyarakat sasaran yang sama. Terkait rencana tersebut, Mitra Pelaksana Pekerjaan sudah mengagendakan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di lapangan.

INDUCTION SOCIAL & ENVIRONMENTAL SAFEGUARD AND GENDER COREMAP-CTI ADB



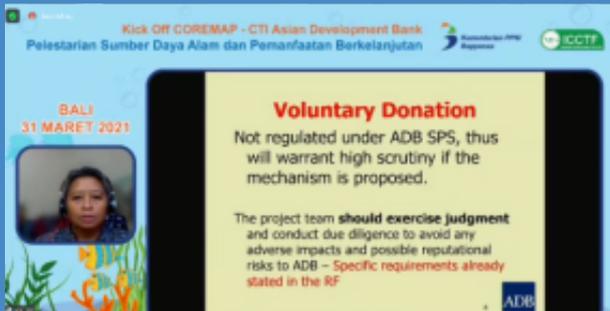
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Helena Lawira selaku *Project Officer Water Sector* Asian Development Bank (ADB), yang juga memperkenalkan narasumber ahli yang akan menjadi pemapar pada kegiatan pengenalan mengenai isu sosial, lingkungan, dan gender dalam implementasi COREMAP-CTI dana hibah ADB.



Pemaparan pertama dilakukan oleh Dennie Mamonto selaku *Environmental Safeguard Specialist* ADB). Dalam paparan ini dijelaskan mengenai *Safeguard Policy Statement* ADB yang bertujuan untuk menghindari dampak merugikan meminimalkan, mitigasi, atau

memberi kompensasi untuk dampak yang tidak dapat dihindari, memperkuat kapasitas klien. Masalah umum yang sering ditemukan misalnya pengkajian yang buruk secara teknis, kurangnya data dasar, reseptor tidak teridentifikasi, kurangnya kuantifikasi, kurangnya mitigasi spesifik lokasi, kurangnya analisa alternatif.

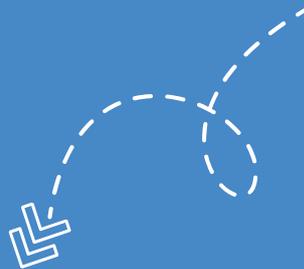




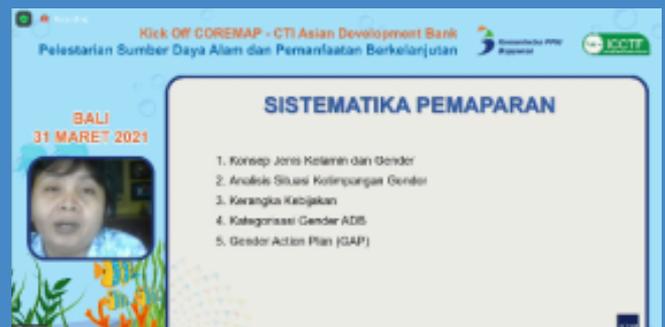
Paparan selanjutnya dilakukan oleh Indah Setyawati selaku *Social Safeguard Specialist* ADB. Dijelaskan bahwa untuk kebutuhan proyek mitigasi secara sosial harus dilakukan misalnya dalam pengadaan tanah. Istilah *involuntary resettlement* tidak selalu mengacu pada

perpindahan penduduk, bisa termasuk tidak memiliki pilihan untuk menolak, termasuk juga menyerahkan rumah, pohon, pekarangan, atau pencaharian.

Misalnya dalam proyek ada yang harus memberikan tanahnya untuk kepentingan proyek maka digunakan istilah *involuntary resettlement*. Dampak yang harus dilihat dan dimitigasi adalah yang mempengaruhi jangka panjang atau sementara, termasuk kebijakan proyek misalnya tidak boleh mengambil sumber ekonomi, contoh dampak tidak permanen misalnya warung tutup sementara selama kegiatan proyek.



Paparan terakhir oleh Riana Puspasari selaku *Gender Specialist* ADB menjelaskan mengenai pengetahuan dasar mengenai gender mulai dari konsep jenis kelamin dan gender, analisis situasi ketimpangan gender, kerangka kebijakan, akategorisasi gender ADB, hingga *Gender Action Plan* (GAP).



Dalam paparannya Riana Puspasa menjelaskan mengenai perbedaan peran status, tanggung jawab, fungsi perilaku perempuan dan laki-laki konstruksi sosial. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan matriks *gender action plan* yang perlu diimplementasikan oleh mitra pelaksana dan juga mengenai partisipasi perempuan ketika konsultasi di lapangan dengan target 30%, disarankan agar daftar undangan perlu dibuat setidaknya 40% perempuan, agar ketika tidak seluruh undangan perempuan datang target masih tercapai.



Catatan Penting terkait Pemukiman Kembali (Resettlement)

- Ruang lingkup dan *trigger* untuk *Involuntary Resettlement* jika ada pemindahan fisik dan ekonomi, restriksi akses, *land use changes*, *land acquisition*.
- Proyek bisa mendapatkan tanah dengan cara membeli (*Negotiated Settlement/Direct Land Purchase*). Jauh lebih direkomendasi oleh ADB dan diberikan kemudahan. Kekuasaan pemerintah tidak campur tangan, seperti kegiatan ekonomi bebas.
- Jika tidak ada *resettlement plan*, maka diminta diperlukan adanya pihak ketiga yang verifikasi dalam transaksi tidak ada tekanan. Ada informasi seimbang, dicatat dan dilaporkan pihak ketiga yang *independent*.
- *Voluntary Donation* perlu *assessment* dan *analisa* secara khusus untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang terjadi pada pemilik tanah dan tidak menyebabkan reputasi buruk.
- Broad Community Support harus ada dan didapatkan sebelum implementasi.
- ADB memiliki Accountability Mechanism (AM) yang merupakan satu forum independen bagi orang yang terkena dampak proyek yang dibantu ADB. Mekanisme ini memungkinkan orang yang terkena dampak proyek untuk menyuarkan kekhawatiran mereka dan mengupayakan penyelesaian terhadap masalah mereka. Mereka juga bisa meminta dilakukannya tinjauan kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran.
- Selanjutnya perlu ada *Project Information Disclosure* (PID) berhubungan dengan informasi kegiatan proyek seperti booklet, social media, dan sejenisnya.
- Perlu disiapkan bagian yang menangani keluhan agar tidak perlu melalui mekanisme akuntabilitas ADB.



06. COVERAGE PUBLIKASI

Salah satu keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Kick Off COREMAP – CTI Provinsi Bali ini adalah publikasi di media cetak maupun online, nasional maupun lokal.

Berdasarkan hasil pantauan media yang dilakukan setelah kegiatan, berikut daftar pemberitaan yang berhasil dihimpun.

LIPUTAN DARI MEDIA MASSA ONLINE

ONLINE



CETAK

POS BALI

WARTA BALI

KORAN MEDIA BALI

Kick Off COREMAP-CTI, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

30 Maret 2021

<https://baliilu.com/kick-off-coremap-cti-pengelolaan-sumber-daya-pesisir-untuk-penguatan-ekonomi-berkelanjutan/>

Badung – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya pesisir dan laut yang sangat kaya dan dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang, kita memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia. Pengelolaan sumber daya pesisir merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

"Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. (. . . .)

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

30 Maret 2021

<https://www.redaksi9.com/read/4234/Pengelolaan-Sumber-Daya-Pesisir-untuk-Penguatan-Ekonomi-Berkelanjutan.html>

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya pesisir dan laut yang sangat kaya dan dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Hal itu diungkapkan, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga dalam kegiatan Kick Off COREMAP-CTI, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/3).

Ia menyebutkan, Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang, kita memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia. Pengelolaan sumber daya pesisir merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

"Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (. . . .)

Sumber Daya Pesisir Untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

30 Maret 2021

<https://kabarbalihits.com/2021/03/30/sumber-daya-pesisir-untuk-penguatan-ekonomi-berkelanjutan/>

Badung-Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai implementing agency Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP-CTI) atau dikenal dengan – Prakarsa Segitiga Karang, menggelar Kick Off COREMAP-CTI di Nusa Dua, selasa (30/3). Kegiatan ini merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka.

Kick off COREMAP-CTI di Bali ini merupakan kolaborasi multi pihak untuk pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (.)

Bappenas Harapkan Nusa Penida Jadi Contoh Pengelolaan Pemanfaatan Terumbu Karang

30 Maret 2021

<https://balinesia.id/read/bappenas-harapkan-nusa-penida-jadi-contoh-pengelolaan-pemanfaatan-terumbu-karang>

Badung – Dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan Nusa Penida bisa menjadi contoh pengelolaan pemanfaatan terumbu karang yang baik.

Bepenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) rencana meningkatkan status pengelolaan efektif kawasan konservasi terumbu karang di Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

"Dari awalnya 40% Kategori Biru, menuju angka 80% Kategori Biru," ungkap Executive Director ICCTF Tonny Wagey, dalam Kick Off kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI), Selasa (30/3/2021).

Disebutkan, saat ini masih sekitar 40% atau 50%. Perlu diketahui, di Level Biru itu, meningkatkan sampai 80% itu susah. Karena tidak hanya harus punya kelompok pengelola atau manajemen, tapi juga harus punya kapasitas (.)

Sumber Daya Pesisir Untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

30 Maret 2021

<https://www.balipuspane.ws.com/pengelolaan-sumber-daya-pesisir-jadi-prioritas-rpjm.html>

Badung-Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai implementing agency Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP-CTI) atau dikenal dengan – Prakarsa Segitiga Karang, menggelar Kick Off COREMAP-CTI di Nusa Dua, selasa (30/3). Kegiatan ini merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka.

Kick off COREMAP-CTI di Bali ini merupakan kolaborasi multi pihak untuk pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (. . . .)

rri.co.id

Ini Tiga Target Indonesia dalam Pengelolaan Terumbu Karang

30 Maret 2021

https://rri.co.id/denpasar/ekonomi-pariwisata/1011346/ini-tiga-target-indonesia-dalam-pengelolaan-terumbu-karang?utm_source=share_link&utm_medium=external_link&utm_campaign=General%20Campaign

Nusa Dua – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) menggelar Kick Off COREMAP – CTI Asian Development Bank, di Nusa Dua, Selasa (30/3/2021).

COREMAP – CTI atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia Program ini sangat penting, mengingat Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang. Indonesia juga memiliki 14% dari luas terumbu karang dunia, dan 39% jenis ikan karang dunia.

Executive Director ICCTF, Dr. Tonny Wagey menjelaskan, COREMAP – CTI Asian Development Bank dilaksanakan di tiga kawasan konservasi perairan di Indonesia. Ketiga kawasan itu meliputi Nusa Penida (Bali), Gili Matra, dan Gili Balu (Nusa Tenggara Barat). (. . . .)

Jaga Kelestarian, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Dimulai

30 Maret 2021

<https://www.balipost.com/news/2021/03/30/183649/Jaga-Kelestarian,Program-Rehabilitasi-dan...html>

Mangupura—Sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang. Bahkan Indonesia memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam terumbu karang ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka. (.)

Nusa Penida Jadi Pilot Projek Coremap-CTI

30 Maret 2021

<https://posbali.co.id/nusa-penida-jadi-pilot-projek-coremap-cti/>

Mangupura—Nusa Penida bakal dijadikan pilot projek rehabilitasi dan konservasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program—Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tak hanya di Nusa Penida, pelaksanaan Coremap-CTI dengan dana hibah Asian Development Bank ini, pilot projek pelestarian terumbu karang ini juga menysasar Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat. Di mana program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakasa Segitiga Karang, merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka.

"Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Kegiatan Coremap-CTI ini merupakan triger atau stimulus pasca pandemi Covid-19 (. . .)

Perairan Nusa Penida Masuk Lokasi Percontohan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

30 Maret 2021

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/30/perairan-nusa-penida-masuk-lokasi-percontohan-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang>

BADUNG— Kawasan konservasi perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Bali, termasuk satu dari tiga lokasi proyek kolaborasi Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reef Rehabilitation and Management Program/Coremap)–Prakarsa Kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative/CTI). Proyek kolaborasi Coremap–CTI yang bertujuan memulihkan ekosistem laut, khususnya terumbu karang, di kawasan konservasi perairan itu didukung Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui Indonesia Climate Change Trust Fund.

Proyek Coremap–CTI di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Klungkung, melibatkan pemerintah dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (. . . .)



Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Laut Bali

30 Maret 2021

<https://baliportalnews.com/2021/03/program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-sebagai-upaya-menjaga-ekosistem-laut-bali/>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), menggelar kegiatan Kick Off COREMAP–CTI, dengan mengusung tema “Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Berkelanjutan”, yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Selasa (30/3/2021) pagi.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kolaborasi antara Kementerian PPN/BAPPENAS, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Klungkung, dan Coral Triangle Center (CTC) yang memiliki tujuan untuk melestarikan ekosistem bawah laut khususnya terumbu karang, yang berada di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) serta didukung pelaksanaannya oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Program ini merupakan salah satu strategi jangka panjang, dalam pengelolaan sumber daya pesisir untuk menguatkan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. (. . . .)

Tiga Target Indonesia dalam Pengelolaan Terumbu Karang, Ini Penjelasannya

30 Maret 2021

<http://kabardewata.com/berita/berita-utama/teknologi/tiga-target-indonesia-dalam-pengelolaan-terumbu-karang-ini-penjelasannya.html#.YGUp5ffb8lQ>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) menggelar Kick Off COREMAP - CTI Asian Development Bank, di Nusa Dua, Selasa (30/3/2021).

COREMAP - CTI atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia. Program ini sangat penting, mengingat Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang. Indonesia juga memiliki 14% dari luas terumbu karang dunia, dan 39% jenis ikan karang dunia.

Executive Director ICCTF, Dr. Tonny Wagey menjelaskan, COREMAP - CTI Asian Development Bank dilaksanakan di tiga kawasan konservasi perairan di Indonesia.

6 OPINI
KAMIS PAING, 1 APRIL 2021
JATI DIRI

Rehabilitasi Terumbu Karang

Di tengah keprihatinan terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan di Bali, setiap upaya untuk aksi pelestarian sumber daya alam tidak dapat dilewatkan oleh semua komponen masyarakat. Tentunya, atas arahan dan koordinasi dari otoritas terkait, baik lembaga pemerintahan maupun swasta, dan kalangan aktivis ekologis.

Dalam konteks inilah, kita mengagresifasi wacana bahwa, kegelapan Nusa Penida bakal dijadikan pilot project rehabilitasi dan konservasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program -Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ribuan proyek pelestarian Coremap-CTI dengan dana hibah Asian Development Bank ini, percontohan (pilot project) pelestarian terumbu karang ini juga menyasar Gili Mera dan Gili Bala, Nusa Tenggara Barat.

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang - Prakarsa Segitiga Karang, merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka.

Seperti dikabarkan koran ini, mengutip Sekretaris Bappenas Hinawana Hariyanto dalam kegiatan Kick off Coremap-CTI di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/3), agaknya hal ini terkait potensi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi.

Selanjutnya, pada perkembangan untuk mengagresifasi kegiatan Coremap-CTI ini merupakan tawaran atau stimulus pasca pandemi Covid-19 untuk menggerakkan kegiatan lain di bidang ekonomi.

Kick off Coremap-CTI di Bali ini merupakan kolaborasi multi pihak untuk pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank yang akan dilakukan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund serta para mitra pelaksana.

Pihak pemerintah, tentunya, berkesempatan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Bappenas terus menekankan bahwa tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional.

Ditakutkan, tujuan program pelestarian terumbu karang ini untuk mencapai efektivitas pengalokasian 80% level hibah. Bentuk intervensi Coremap - CTI dengan pendanaan Asian Development Bank di Nusa Penida, Gili Mata, dan Gili Bala tersebut dilakukan dalam bentuk pengaparan kelestarian dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem dan peningkatan mutu pelestarian berkelanjutan. (*)

POS BALI
1 April 2021

MEDIA BALI
31 Maret 2021



Bappenas Kejar 80% Level Biru Efektivitas Pengelolaan KKP Nusa Penida

NUSA DUA - Dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) berencana meningkatkan status pengelolaan efektif Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida. Dari awalnya 40% kategori biru menuju angka 80% kategori biru.

Demikian disampaikan Executive Director ICCTF Tony Wagey dalam kick off kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initia-



EXECUTIVE Director ICCTF Tony Wagey (kiri) bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Anfin Rudiyanto.

tive (Coremap-CTI) di Nusa Dua, Selasa (30/3).

"Sekarang masih sekitar 40% atau 50%. Dan untuk dikedepan, di level biru itu, meningkatkan sampai 80% itu tidaklah mudah. Karena tidak hanya harus punya kelompok pengelola atau manajemen, tapi juga harus punya kapasitas. Nusa Penida sendiri sebenarnya sudah maju, tapi tentu harus dibuat benar-benar efektif. Dan kita berharap, dengan pembiayaan ini nantinya bisa menjadi contoh pengelolaan pemanfaatan terumbu karang yang baik," jelasnya.

BACA: Bappenas... di Hal 7

Bappenas

Sambungan Hal 1

Pengelolaan yang baik, sambung dia, tentu menjadi hal yang penting. Agar tidak sampai terjadi eksploitasi berlebih, melalui pemahaman soal carrying capacity (daya dukung). "Untuk mencapai 80% biru, salah satunya sudah harus mempunyai staff yang mengurus soal administrasi, pencatatan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, juga harus mulai memikirkan soal kelangsungan secara berkelanjutan, baik dari segi pendanaan. Karena di level berikutnya, pemerintah tidak akan berikan dana lagi. Melainkan mereka harus bisa hidup sendiri. Itulah Level Gold," terangnya.

Sementara Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga menjelaskan, Coremap-CTI notabene adalah program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia. Sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengandalkan laut.

kelanjutan dan target RPJMN 2020-2025 dalam pembangunan kelautan dan penikanan, Bappenas berperan sebagai enabler bagi para pemangku kepentingan. Baik Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat melalui pendekatan convergence. Dimana Bappenas menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif," tambahnya.

Terpisah seperti disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Anfin Rudiyanto mengatakan, Coremap-CTI juga dilaksanakan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals 14 (Life Below Water). Yakni konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim, untuk mencapai 3 target utama SDG's antara lain perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengkonservasi setidaknya 10% area pesisir laut, serta meningkatkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Kegiatan Coremap-CTI ini merupakan trigger atau stimulus pasca pandemi Covid-19 untuk menggerakkan kegiatan lain di bidang ekonomi," ungkap Hariyoga.

Dia juga menegaskan, sesungguhnya tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut dia, pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang, justru dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional.

"Jadi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ber-

"Tujuan program pelestarian terumbu karang ini adalah untuk mencapai efektivitas pengelolaan 80% level biru. Bentuk intervensinya adalah penguatan kelembagaan dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem, dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan," bebemnya.

Lebih lanjut untuk diketahui pula, seperti disampaikan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti, Bappenas melalui ICCTF sejak tahun 2019 silam telah dipercaya untuk mengelola proyek Coremap-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank.

Dukungan senilai USD 5,2 juta itu rencananya dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih selama 2 tahun. Yakni dimulai 4 Maret 2021 hingga 31 Desember 2022 (adi,tra)

07. GALERI FOTO



Rombongan ICCTF-Bappenas mendapatkan penjelasan singkat program Indonesia Coral Reef Garden-Pemulihan Ekonomi Nasional (ICRG-PEN) 2020 dan metode Mars Assisted Reef Restoration System (MARRS)



Rombongan ICCTF-Bappenas melakukan transplantasi karang dengan metode Mars Assisted Reef Restoration System (MARRS)

07. GALERI FOTO



Rombongan ICCTF-Bappenas melakukan transplantasi karang pada struktur Reef Star di atas kapal



Metode MARRS rencananya akan diadopsi oleh mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB untuk merehabilitasi Coral Reefs di Nusa Penida. Harapannya rehabilitasi ini dapat memperbaiki kondisi ekosistem Coral Reefs dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar terutama mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.



Sekretariat ICCTF

Gedung Lippo Kuningan Lt.15
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12,
Jakarta 12940, Indonesia
E: secretariate@icctf.or.id
T: +62 (21) 8067 9386
F: +62 (21) 8067 9387

 www.icctf.or.id

 [ICCTF_ID](https://twitter.com/ICCTF_ID)

 [ICCTFofficial](https://www.instagram.com/ICCTFofficial)

 [ICCTF Official](https://www.youtube.com/ICCTFOfficial)

 [Indonesia Climate Change Trust Fund](https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund)